

ABSTRAK

Nofa Syam, 11220021, 2015 **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khoirul Hidayah S.H, M.HI

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Label Halal, Sertifikasi Halal*

Sertifikasi Halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Majelis Ulama' Indonesia untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi makanan bagi konsumen muslim, terhadap Label Halal pada produk makanan. Begitu banyak label halal yang beredar, namun masih mengandung bahan berbahaya. Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal yang dibutuhkan bagi konsumen muslim yang mayoritas penduduk Indonesia. Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu *Pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal? *Kedua*, Bagaimana upaya hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan? dan *Ketiga*, Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep (*conceptual approach*). Sumber data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim telah diatur namun, bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan label halal pada produk makanan tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan pada UUPK atau perundang-undangan di Indonesia hanya bersifat materil tidak pada moral. Pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada perundang-undangan kurang memberikan efek jera dan dalam hukum Islam akan terkena hukuman yaitu hudud Allah. Terdapat kolerasi yang erat pada perundang-undangan yaitu, menjaga hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.